

SHARIAH GOVERNANCE DAN KUALITAS TATA KELOLA PERBANKAN SYARIAH

Ali Rama, Yella Novela
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
rama@uinjkt.ac.id

Abstract.

Corporate governance for Islamic banking has a unique feature compared with banking conventional. It is required to complement the existing governance framework with shariah governance system to ensure the shariah compliance of all Islamic banking's operational. Therefore, this study aims to analyze the effect of the practice of shariah governance to the quality of GCG implemented by Islamic banks. Practices of shariah governance are measured by number of shariah board members, doctoral qualification of shariah board and frequency of shariah board meeting. The study finds that shariah governance has a significant impact to the increase quality of GCG in Islamic banks. Another interesting finding is that the increase of credit risk (NPF) leads to the worse of Islamic banks' corporate governance. ROA and CAR have no significant effect to the quality of corporate governance in Islamic banks. The study recommends that the Islamic banks should improve their shariah governance practices in order to increase their governance performance as well as public confidence.

Keyword: Shariah Governance; Good Corporate Governance; Financial Performance; Islamic Banks.

Abstrak.

Sistem tata kelola pada bank syariah memiliki keunikan dengan sistem tata kelola pada bank konvensional. Selain memiliki sistem tata kelola perusahaan, bank syariah menerapkan sistem shariah governance yang berfungsi sebagai sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan seluruh operasional bank syariah terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh praktek shariah governance (SG) terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Praktek shariah governance direpresentasikan dalam bentuk keanggotaan DPS, kualifikasi pendidikan dan frekuensi rapat DPS. Penelitian ini menemukan bahwa praktek shariah governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Temuan lainnya adalah risiko pembiayaan (NPF) yang semakin meningkat akan memperburuk kualitas tata kelola perusahaan. Sementara variabel kinerja (ROA) dan kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan pada kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong bank syariah untuk meningkatkan kualitas shariah governance demi meningkatkan kinerja tata kelola dan kepercayaan publik terhadapnya.

Kata Kunci: Tata Kelola Syariah; Good Corporate Governance; Kinerja Keuangan; Bank Syariah.

Diterima: 3 April 2015; Direvisi: 1 Juni 2015; Disetujui: 9 Juni 2015

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan asset dalam lima tahun terakhir yang tumbuh rata-rata 40% per tahun. Indikator terlihat lainnya adalah semakin meningkatnya market share (meskipun saat ini masih di bawah 5%), meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan semakin baiknya proses penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan momentum tersebut, perbankan syariah harus senantiasa memperbaiki system tata kelola perusahaan supaya dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan system konvensional yang sudah ada. System tata kelola yang baik tentunya akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan operasional lembaga perbankan syariah.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah punya kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, preaktek dan manajemennya. Akibatnya, lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Desain model tata kelola perusahaan *corporate governance* dalam perspektif Islam memiliki fitur yang unik dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya (lihat Rama, 2014). Istilah *Shariah Governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon ketiadaan istilah *corporate governance* (GCG) dalam literatur Islam.

Meskipun sebenarnya konsep *shariah governance* (SG) memiliki kesamaan peran dan fungsi yang sama dengan institusi *hisbah* dalam sejarah masyarakat Islam klasik, yaitu sebagai lembaga khusus yang mengawasi berjalannya pasar sesuai dengan aturan-aturan islam. Elemen penting dalam *shariah governance* (SG) adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan yang berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah.

Dalam konteks kerangka regulasi, sistem tata kelola bagi perbankan syariah disebutkan secara umum dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu khususnya di Bab V bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut bahwa DPS diberikan wewenang untuk melakukan

pengawasan dan penasehatan atas kepatuhan prinsip syariah seluruh aktivitas bank syariah. bagian ini pada hakekatnya mengatur tentang sistem tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Konsep teknis dan operasional sistem tata kelola bagi perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) diatur secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

PBI ini selanjutnya dijabarkan lebih detail dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun demikian, perlu diakui bahwa sistem tata kelola bagi perbankan syariah merupakan hasil adaptasi dari sistem tata kelola perbankan nasional yang sudah ada (PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum). Istilah *Shariah Governance* pun tidak ditemukan dalam UU, PBI maupun SEBI tersebut.

Istilah *shariah governance* bagi lembaga keuangan syariah diadaptasi dari istilah yang dikeluarkan oleh International Financial Services Board (IFSB) dalam Guideline No-10 yang dikhususnya bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan sesuai prinsip syariah. sistem tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif yang dapat memastikan berjalannya proses pengawasan sebelum terjadinya transaksi (*ex-ante*) maupun setelah terjadinya transaksi (*ex-post*) pada lembaga perbankan syariah.

Di sisi lain, sistem GCG yang efektif menurut Ifham (2010:293) bagi bank syariah dibangun dengan memperhatikan sejumlah pilar mekanisme GCG, antara lain: (1) Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS); (2) Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh; (3) Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga bekerja sama kepada DPS dan auditor internal untuk melaporkan laporan keuangan suatu Bank Syariah; (4) Transformasi budaya korporasi; dan (5) Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia.

Sistem tata kelola yang baik bagi bank syariah bukan hanya dimaksudkan demi mencapai tujuan perusahaan tetapi juga sebagai sistem pertahanan atas berbagai bentuk tekanan dari internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan

keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Hal yang sama juga dalam konteks tata kelola syariah (*shariah governance*), sistem ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah khususnya pada kepatuhannya terhadap prinsip syariah dalam keseluruhan aktivitasnya. Pengabaian terhadap sistem tata kelola ini tentunya akan berdampak pada risiko syariah, yaitu bentuk risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara empiris pengaruh sistem *shariah governance* (tata kelola syariah) terhadap kualitas tata kelola bank syariah di Indonesia. *Shariah Governance* yang dimaksud adalah hasil skoring dari tiga kategori, yaitu jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan doktor dan frekuensi rapat DPS. Penelitian ini ingin melihat apakah jumlah anggota DPS, status pendidikan doktor dan jumlah frekuensi rapat DPS dalam bentuk *skoring* berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan pada bank syariah. Selain itu, variabel kinerja keuangan, kecukupan modal dan risiko pembiayaan dimasukkan dalam sistem sebagai variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kualitas tata kelola bank syariah.

Istilah "*Corporate Governance*" pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. Dalam *Cadbury Report* yang dimaksud dengan *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Dengan demikian, *corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka (Sudarmayanti, 2007:53).

Sementara *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah struktur yang mengatur para pemegang saham, komisaris dan manager dalam menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta mengawasi kinerja. Selanjutnya, menurut *Forum*

for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (lihat Devano dan Rahayu, 2006).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama dari *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Fairness*, *Transparency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Keempat prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Khairatu, 2006).

Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.

Disclosure/Transparency (Transparansi)

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan.

Accountability (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggungjawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. *Corporate Governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Jika *accountability* ini diterapkan secara efektif menurut Dariri (2005) maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan, perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Responsibility (Tanggung Jawab)

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat (lihat Maksum, 2005:13).

Konsep Tata Kelola Perbankan Syariah

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indonesia antara lain di tandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya sekmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai

pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 menerbitkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Shariah Governance* (SG).

Konsep tata kelola syariah ini atau biasa disebut *shariah governance* (SG) penting bagi lembaga keuangan syariah dengan berbagai alasan. Adapun alasannya menurut Algaoud dan Lewis (2001:100) adalah: (i) Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah governance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah; (ii) karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah; dan (iii) dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah.

Konsep SG bagi bank syariah yang dikeluarkan oleh IFSB memandang SG sebagai komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang sudah ada. Selain memiliki dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, bank syariah harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah: DPS), audit syariah internal dan eksternal dan unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*. Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS adalah elemen penting dalam sistem tata kelola syariah (*shariah governance*). DPS adalah merupakan suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat

secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip-prinsip syariah (lihat Rama, 2014).

Adapun definisi *shariah governance* menurut IFSB (IFSB-10, 2009) adalah “*a set of institutional and organisational arrangements through which Islamic financial institutions ensure that there is an effective independent oversight of shariah compliance over the issuance of relevant shariah pronouncements, dissemination of information and an internal shariah compliance review*”. Isra (2010) selanjutnya menguraikan definisi tersebut dengan membagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah dan fungsi yang terkait seperti Divisi Syariah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syariah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syariah.

METODE

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh shariat governance (SG) terhadap kualitas tata kelola bank syariah. Selain variabel SG, penelitian ini juga memasukkan faktor kinerja keuangan, kecukupan modal, dan risiko pembiayaan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola bank syariah. Objek Penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia pada periode keuangan 2013.

Penelitian ini memakai pendekatan statistik parametrik. Statistik Parametrik adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang mempunyai skala pengukuran paling sedikit interval, disamping juga data tersebut harus berdistribusi normal dan memenuhi asumsi-asumsi lainnya (Sujoko, 2004). Penelitian ini juga menggunakan angka rasio atau skala rasio yang menyajikan nilai sesungguhnya dari variabel-variabel yang diukur dengan skala rasio (Rochaety, dkk., 2007).

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis melihat keterkaitan hubungan dan mengkontekstualisasikan keterangan dari data yang diperoleh. Penelitian ini juga bersifat kuantitatif artinya berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur, yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga

tersebut, laporan-laporan, baik mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan (Teguh, 2005). Penelitian ini juga menggunakan metode content analysis dengan cara membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan. Informasi yang didapatkan dilakukan skoring.

Sumber data penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan setiap bank syariah di Indonesia dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data-data tersebut ditelusuri melalui website terkait.

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linear berganda. Metode analisis linear berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas (Sanusi, 2013).

Adapun konsep operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Good Corporate Governance (GCG)

Variabel GCG dalam penelitian ini menjadi variabel terikat. Data variabel GCG dalam penelitian ini adalah hasil self assessment terhadap pelaksanaan GCG pada bank syariah berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang dipublikasikan secara periodik. Adapun nilai hasil self assessment di bagi menjadi 4 peringkat, yaitu peringkat ke-1 = sangat baik (nilai komposit < 1.5); peringkat ke-2 = baik ($1.5 < \text{nilai komposit} < 2.5$); peringkat ke-3 = cukup baik ($2.5 < \text{nilai komposit} < 3.5$); peringkat ke-4 = kurang baik ($3.5 < \text{nilai komposit} < 4.5$); dan peringkat ke-5 = tidak baik ($4.5 < \text{nilai komposit} < 5$) (lihat SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan GCP pada BUS dan UUS). Dengan demikian, nilai self assessment yang semakin rendah menunjukkan pelaksanaan tata kelola perusahaan bank syariah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebaliknya, semakin tinggi nilainya, semakin kurang kualitas tata kelola perusahaanya.

Shariah Governance (SG)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep syariah governance, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah. Oleh karena itu, syariah goverannce (SG) dalam penelitian ini diukur dengan cara skoring terhadap tiga kateori, yaitu (i) jumlah anggota DPS. Jika jumlah anggota DPS pada bank syariah memenuhi

ketentuan Peraturan Bank Indonesia, yaitu minimal 2 anggota maka diberi nilai 1. Dan sebaliknya jika tidak sesuai diberi nilai 0; (ii) kualifikasi pendidikan anggota DPS. Jika anggota DPS berstatus doktor maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi nilai 0; dan (iii) frekuensi rapat DPS. Jika kehadiran rata-rata anggota DPS dalam rapat DPS lebih dari 50% maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi 0. Total skor didapatkan dengan pembobotan dengan masing-masing diberi bobot 1/3 yang selanjutnya membentuk indeks nilai syariah governance (SG). Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa: jumlah anggota DPS pada bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan, kualifikasi pendidikan doktor dan kehadiran rapat DPS yang tinggi. Nilai SG dianggap dianggap berhubungan negatif terhadap nilai self assessment implementasi GCG pada bank syariah. Artinya, semakin tinggi nilai SG, maka semakin rendah nilai GCG yang berarti kualitas tata kelola bank syariah yang lebih baik.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini direpresentasikan oleh variabel Return on Assets (ROA). Rasio ROA merupakan rasio laba bersih terhadap total aset. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang tinggi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif terhadap nilai GCG, yaitu jika ROA meningkat maka nilai GCG turun yang berarti semakin baik implementasi GCG pada bank syariah.

Kecukupan Modal

Kecukupan modal dalam penelitian ini diwakilkan oleh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini merupakan rasio modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Nilai rasio yang tinggi menunjukkan modal yang semakin tinggi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif terhadap nilai GCG, yaitu jika CAR meningkat maka nilai GCG turun yang berarti implementasi tata kelola lebih baik.

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbulnya kerugian terkait dengan kemungkinan bahwa counterparty akan gagal memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan diukur dengan NPF (*Non Performing Financing*). NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan risiko yang semakin tinggi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa variabel NPF berpengaruh positif terhadap nilai GCG, yaitu

jika NPF meningkat maka nilai GCG semakin meningkat pula yang berarti implementasi tata kelola semakin buruk.

Berdasarkan pada variabel-variabel yang telah diuraikan, maka model persamaan matematika model regresi linier berganda penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana: Y: Good Corporate Governance bank syariah; a: Intercept atau konstanta; b: Koefisien regresi; X1: Syariah governance; X2: kinerja keuangan (ROA); X3: kecukupan modal (CAR); X4: Risiko pembiayaan (NPF); dan e: Error term.

Model regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi klasik agar menghasilkan nilai-nilai koefisiensi yang tidak bias. Oleh karena itu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebelum melakukan uji regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *shariah governance* terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Selain itu, variabel kinerja keuangan, kecukupan modal dan risiko pembiayaan juga dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola bank syariah.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Berdasarkan uji normalitas didapatkan pola distribusi dengan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya tidak terlalu jauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal.

Tabel 1: Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Colinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	SG (X1)	0.952	1.051
2	ROA (X2)	0.944	1.059
3	CAR (X3)	0.894	1.118
4	NPF (X4)	0.891	1.122

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 1. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara seluruh variabel independennya. Dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam satu

model regresi dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* dimana nilai *tolerance* mendekati 0,1 dan VIF di atas 0. Berdasarkan hasil perhitungan *Tolerance* dan VIF pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan mengandung heterokedastisitas jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Tabel 2 menyajikan hasil uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Problem autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Kondisi ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena adanya “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Tabel 2: Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-Watson
1	,680	,462	,385	8,49825	2,327

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai hitung Durbin-Watson sebesar 2.327. Maka dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa DW test terletak pada daerah uji (berada diantara -2 dan +2) yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada persamaan regresi dalam penelitian ini.

Uji Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien regresi yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisiensi dapat dilihat pada tabel 2 di atas yang diambil dari hasil uji regresi model penelitian. Hasilnya adalah hanya sekitar 39% variabel independen dalam sistem yang berpengaruh terhadap

variabel dependen. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel *shariah governance* (SG) dan variabel lainnya hanya mampu menjelaskan sebesar 39% variasi variabel kualitas tata kelola bank syariah (GCG).

Tabel 3 menampilkan hasil uji Statistik t, yaitu hasil yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t menemukan bahwa variabel *shariah governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas GCG bank syariah. Hal ini berarti skor *shariah governance* yang semakin meningkat akan menurunkan nilai *self assesment* implementasi GCG bank syariah.

Semakin banyak jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan DPS berkualifikasi doktor dan kehadiran rapat DPS akan semakin meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa nilai *self assesment* yang kecil menunjukkan bank syariah menerapkan sistem GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dengan demikian, sistem *shariah goverance* berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.

Tabel 3. Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,383	5,899		-,065	,949		
1 SG	-7,423	5,426	-,194	-1,368	,049	,952	1,051
ROA	-,002	,100	-,003	-,020	,984	,944	1,059
CAR	,147	,182	,118	,803	,429	,894	1,118
NPF	5,723	1,247	,674	4,591	,000	,891	1,122

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Variabel signifikan lainnya terhadap kualitas GCG bank syariah adalah risiko pembiayaan (NPF). Namun pengaruhnya ditemukan berpengaruh secara positif. Yang berarti bahwa jika nilai NPF meningkat maka nilai GCG juga meningkat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah maka akan mengurangi kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.

Sementara variabel kinerja keuangan (ROA) dan kecukupan modal (CAR) ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah (GCG). Ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah begitupula dengan permodalan yang dimiliki tidak memiliki dampak terhadap nilai *self*

assassment penerapan sistem tata kelola perbankan pada bank syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan melalui uji statistik F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Adapun hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Statistik F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1736,025	4	434,006	6,009	,001
Residual	2022,165	28	72,220		
Total	3758,190	32			

a. Dependent Variable: ABS_Res2

b. Predictors: (constant), NPF, SG, ROA, CA

Tabel 4 menunjukkan nilai F sebesar 6,009 dengan tingkat signifikansi 0,05. Dapat dilihat bahwa pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df_1=4$ dan $df_2 (24-4-1)=19$, maka diperoleh hasil untuk F tabel sebesar 2,90. Berdasarkan hal tersebut, F hitung lebih besar dari F tabel ($6,009 > 2,90$). Berdasarkan signifikansi, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi pada uji F kurang dari 0,05. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa model regresi tersebut signifikan secara simultan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu *shariah governance* (SG), kinerja keuangan (ROA), modal (CAR) dan risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap tata kelola perusahaan bank syariah (GCG).

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh praktek *shariah governance* terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah begitupula dengan sejumlah variabel independen lainnya, seperti kinerja keuangan (ROA), kecukupan modal (CAR) dan risiko pembiayaan (NPF).

Penelitian ini menemukan bahwa *shariah governance* (SG), yaitu jumlah anggota DPS, kualifikasi doktor DPS dan frekuensi kehadiran rapat DPS berpengaruh signifikan-negatif terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Semakin tinggi nilai skor SG, semakin rendah nilai *self assessment* GCG bank syariah. *Self*

assessment yang rendah berarti memiliki peringkat lebih baik. Dengan demikian, sistem *shariah governance* pada bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. penelitian ini juga menemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif-signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Dengan demikian, semakin tinggi kredit macet (NPF) akan semakin memperburuk tata kelola perusahaan bank syariah.

PUSTAKA ACUAN

- Abdurrahman, Sambas A. M. M. 2011. *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Algifari. 2013. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono dan Koster, W. 2010. *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Brown, Lawrence, dan J., Caylor. 2004. *Corporate Governance and Firm Performance*. Boston Accounting Research Colloquium 15th.
- Dariri, M. Ahmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Donald, Kieso E. dan Weygandt J Jerry. 1995. *Akuntansi Intermediate. Jilid Satu, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Effendi, M. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu nya Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan, Asep. 2013. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). 2009. *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*.
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Maksum, Azhar. 2005. *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*. Medan: Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU.
- Priyatno, Duwi. 2005. *Buku Saku Analisis Data SPSS*
- Rama, Ali. 2014. *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*. Laporan Penelitian Publikasi Nasional,

Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rochaety, Ety, dkk. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*. Bandung: Penerbit Mitra Wacana Media.

Sanusia, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sholohin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.